

unplag abd fajar

by 0895 3920 99295 Parafrese & Cek Turnitin

Submission date: 24-Jun-2022 09:21PM (UTC-0400)

Submission ID: 1862533464

File name: unplag_abd_fajar.docx (58.4K)

Word count: 2249

Character count: 16034

Implementasi Program E- Warong

⁴ Abdillah Fajar¹⁾, Isnaini Rodiyah²⁾
 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah
 Sidoarjo, Indonesia

*Email : abdillahfajar99@gmail.com , isnainirodiyah@umsida.ac.id

⁶ **ABSTRACT** Implementation of the non-cash food assistance program through ¹warong in Wonomlati Village can be realized if it is in accordance with implementation measurements, such as: standards and policy objectives/policy measures and objectives, resources, characteristics of implementing organizations, attitudes of implementers, communication between organizations, environment social, economic and political. However, the implementation of the BPNT program in Wonomlati Village in terms of standards and policy targets has not been effective enough, due to the lack of precise targeting of aid recipients, as well as the timeliness of aid delivery. Method used _ descriptive qualitative data obtained through observation , documentation , interview and use source books⁵ , journals , and document policy . Results study this show that Measurement of the success of implementing the non-cash food assistance program in Wonomlati Village which⁹ is said to be effective is an indicator of resources because resources can run well because service providers can help make it easier for the community to obtain good services, the characteristics of implementing organizations in this case can work with unity and in procedures that have been set ⁷the appropriate so that they can achieve the same goal, the attitude of the implementers in this e-warong program is good, this can be seen from the very selective role of officers in determining the people who receive the BPNT program, communication between organizations is going quite well so that⁸ it does not there are differences in data on BPNT recipients, and the socio-economic and political environment¹¹ can be said to be effective because it can help the community's economy. Meanwhile, one indicator in the implementation of the non-cash food assistance program that has not been achieved is the standard indicators and policy targets, because there are still delays in receiving aid which causes confusion and queues in taking aid at the specified e-warong .

Keywords – Implementation, food assistance, BPNT, e-warong

ABSTRAK Implementasi program bantuan pangan non tunai melalui e-warong di Desa Wonomlati ini dapat terwujud jika sesuai dengan pengukuran implementasi, seperti : standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi, lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Akan tetapi di dalam pengimplementasiannya program BPNT di Desa Wonomlati dalam aspek standar dan sasaran kebijakan belum cukup efektif, dikarenakan masih terjadi kurang tepatnya sasaran penerima bantuannya, serta ketepatan waktu pemberian bantuan. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, wawancara dan menggunakan sumber buku, jurnal, serta dokumen kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengukuran keberhasilan implementasi program bantuan pangan non tunai di Desa Wonomlati yang dikatakan efektif adalah indikator sumberdaya dikarenakan sumberdaya dapat berjalan dengan baik karena antara pihak penyedia jasa dapat membantu mempermudah masyarakat memperoleh layanan dengan baik, karakteristik organisasi pelaksana dalam hal ini dapat bekerja dengan kesatuan dan dalam prosedur yang ditetapkan telah sesuai² sehingga dapat mencaai satu tujuan yang sama, sikap para pelaksana dalam program e-warong ini sudah baik hal tersebut dapat dilihat dari peran petugas yang sangat selektif dalam menetapkan masyarakat yang memperoleh program BPNT ini, komunikasi antar organisasi berjalan cukup baik sehingga tidak ada perbedaan data penerima BPNT, dan lingkungan sosial ekonomi dan politik dapat dikatakan efektif karena dapat membantu perekonomian masyarakat. Sementara satu indikator dalam implementasi program bantuan pangan non tunai yang belum tercapai yaitu indikator standar dan sasaran kebijakan, karena masih adanya keterlambatan penerimaan bantuan yang menyebabkan kebingungan serta terjadinya antrian dalam pengambilan bantuan di e-warong yang ditentukan.

Kata Kunci: Implementasi, Bantuan pangan, BPNT, e- warong.

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang sering terjadi di berbagai negara, khususnya Indonesia yang merupakan Negara berkembang. Kemiskinan telah membuat jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan lebih tinggi, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, dan masalah lain yang menjurus ke arah tindakan kekerasan dan kejahatan. Kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara memang perlu dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius, karena saat ini kemiskinan, membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Badan pusat statistik (BPS) menjelaskan bahwa masalah kemiskinan di Indonesia menjadi masalah yang selalu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Dalam mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mensejahterakan keluarga kurang mampu sejak era pemerintahan Soeharto sampai saat ini. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah kemiskinan [1].

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang cukup di perhatikan oleh pemerintah sejak dulu. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan nasional dengan harapan dapat memutuskan tali kemiskinan di Indonesia[2]. Namun faktanya sampai saat ini masalah kemiskinan masih menjadi masalah nasional yang belum terselesaikan secara utuh, meskipun jumlah penduduk miskin setiap tahunnya mengalami penurunan. Terdapat tujuh program pemerintah saat ini dalam hal pengentasan kemiskinan. Dalam penelitian ini peneliti akan memilih salah satu dari tujuh program pemerintah saat ini yaitu program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program bantuan berupa pangan yang diperuntukkan untuk keluarga kurang mampu yang baru dimulai 2017. Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung pada Pasal 1 ayat 1 sebagai berikut: "Penanganan Fakir miskin adalah upaya yang terarah[3]. Terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara." Selanjutnya pada tahun 2018 muncul peraturan Menteri yaitu Permensos Nomor 11 tahun 2018 tentang peyaluran bantuan pangan non tunai[4].

Bantuan sosial pangan non tunai adalah paradigma baru dalam penetapan strategi percepatan pemenuhan kebutuhan dasar dalam bentuk pangan non tunai yang dilakukan secara nasional berdasarkan peraturan presiden RI nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial pangan secara non tunai. Serta merupakan penyempurnaan pelaksanaan subsidi beras sejahtera (Rastra) yang dianggap masih kurang efektif dan efisien[5]. Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dilaksanakan melalui sistem perbankan untuk mendukung perilaku produktif masyarakat melalui fleksibilitas waktu penarikan bantuan dan akumulasi aset melalui kesempatan menabung. Pada akhirnya, penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai diharapkan memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat melalui akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan. Pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dibantu oleh perbankan yang menjadi agen penyalur bantuan, salah satunya yaitu program e-warung yaitu warung elektronik gotong royong menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) non tunai bagi warga tidak mampu. Dengan sistem ini setiap bantuan sosial dan subsidi akan disalurkan secara non tunai menggunakan sistem perbankan. Tujuannya untuk mengurangi penyimpangan, kemudahan kontrol serta tepat sasaran, waktu dan jumlah. Selanjutnya, untuk mendukung pengelolaan e-warung, maka Kementerian Sosial selaku pencetus program e-warung telah bekerjasama dengan HIMBARA (Himpunan Bank-bank Negara) seperti Bank BNI, BRI, BTN dan Mandiri[6].

Elektronik warung gotong royong (e-warung) merupakan program bantuan sosial sebagai bentuk sinergi dari Program Keluarga Harapan (PKH) dengan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). E-Warung melayani transaksi pembelian bahan pangan pokok bersubsidi, gas LPG 3 kg, pembayaran listrik, pupuk. Harga bahan pangan yang dijual melalui e-Warung cenderung lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran. Penerima manfaat bantuan sosial juga dapat bertransaksi di e-Warung dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dalam pembentukan E-Warung diawali dengan penentuan lokasi terlebih dahulu (desa, kecamatan pada setiap kabupaten). Setelah lokasi terpilih lalu dilakukan validasi terhadap penerima manfaat Bantuan Sosial yang produktif untuk dijadikan pengurus E-Warung dari KUBE Jasa, setelah itu dilakukan bimbingan teknis kepada yang tervalidasi untuk menetapkan kepengurusan.

Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu kabupaten yang mengikuti program e-warung. Berdasarkan data dari BPS Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo pada 2019 tercatat sebanyak 116,440 ribu jiwa atau sekitar 5,32 persen dari total populasi Kabupaten Sidoarjo. Jumlah tersebut tersebar di 18 Kecamatan, dan salah satu kecamatan yang memiliki angka kemiskinan terbesar di Kabupaten Sidoarjo yaitu Kecamatan Krembung. Kecamatan Krembung sendiri terdiri atas 19 desa. dari 19 desa di Kecamatan Krembung itu sendiri, desa Wonomlati merupakan salah satu penerima bantuan pangan non

tunai (KPM BPNT) yang cukup banyak. Sebagaimana diketahui dari berita acara hasil musyawarah di desa Wonolati mengumumkan jumlah penerima bantuan pangan non tunai (KPM BPNT)[7].

Tabel 1.1.
Jumlah Penerima KPM Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Wonolati.

| No. | Dusun | Keluarga Berpendapatan Rendah | Penerima Bantuan KPM BPNT |
|---------------|----------|-------------------------------|---------------------------|
| 1. | Mlaten | 238 | 206 |
| 2. | Guyangan | 266 | 246 |
| 3. | Balowono | 82 | 76 |
| Jumlah | | 586 | 528 |

Sumber: UPBPNT Desa Wonolati, 2019

II. METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan proses induktif berdasarkan pengamatan obyek lapangan yang bersifat ilmiah. Pendekatan yang digunakan deskriptif berfokus pada permasalahan yang ada, fakta di lapangan maupun temuan-temuan baru sesuai dengan kondisi nyata di lapangan[8]. Penelitian ini dilakukan di Desa Wonolati Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini berfokus pada implementasi program e-warong yang ada di Desa Wonolati Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Fokus penelitian ini berdasarkan pada enam tahapan diantaranya adalah Standar dan sasaran Kebijakan/ Ukuran dan tujuan kebijakan., sumber daya, Karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi, lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive* dalam pengambilan dan pemilihan informan. Informan dalam penelitian ini berjumlah empat orang terdiri dari satu Sekertaris Desa Wonolati, dua orang pemilik e-warong dan masyarakat penerima manfaat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder dengan penganalisisan data melalui beberapa tahap yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan[9].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari pembahasan dan uraian diatas mengenai implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui e-Warong di Desa Wonolati Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, maka diperoleh kesimpulan Enam variabel yang dikemukakan oleh Van Matter Van Horn, yang mampu mempengaruhi kinerja kebijakan[10], ialah :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan / Ukuran dan Tujuan kebijakan di desa Wonolati.

Di dalam pemilihan dan seleksi sasaran penerima bantuan, pemerintah desa dengan tim sudah melakukan monitoring terhadap siapa juga tidak lepas dari buku panduan KEMENSOS, dimana penerima bantuan adalah keluarga miskin dengan kondisi dibawah 25%.

2. Sumber daya di desa Wonolati.

Sumber daya yang dimaksudkan disini adalah sumber daya manusia, yaitu bagaimana para pelaku pelaksan program ini dapat berjalan dengan baik atau tidak. Dapat kita simpulkan bahwa para pelaku pelaksana program di desa wonolati ini cukup baik dalam melakukan tugasnya terbukti, dengan ketepatan sasaran mereka dalam menentukan siapa yang layak mendapatkan bantuan, begitu pula pelaku dari pihak e-wrong, pihak e-warong sendiri cukup tanggap dalam memenuhi keinginan bantuan apa yang para (KPM) keluarga penerima manfaat inginkan.

3. Karakteristik organisasi pelaksana di desa Wonolati

Karakteristik yang dimaksud disini yaitu hubungan antar birokrasi yang terjadi dengan satu tujuan yang sama, dimana faktor yang cukup penting dalam ketepatan sasaran pada suatu program, disini dapat kita lihat bagaimana proses yang dilakukan oleh pemerintah desa Wonolati selaku penyeleksi langsung catatan keluarga penerima manfaat (KPM) kemudian tim SLRT kecamatan sebagai pemvalidasian data seperti prosedur yang ditetapkan untuk selanjutnya diserahkan ke pemerintahan selanjutnya.

4. Sikap para pelaksana

Dalam hal ini dapat diketahui bagaimana para pelaku pelaksana seperti tim dari pemerintahan desa, tim SLRT kecamatan, maupun dari pihak e-warong yang bertindak sebagai penyedia bahan pangan yang akan dibutuhkan oleh para KPM dalam menukarkan bantuan. Dari tiga pihak tersebut, mereka sudah bekerja dengan cukup optimal, masing-masing dari mereka pun melakukan tugasnya dengan cukup baik. Dari situ kita dapat melihat saling berkomitmennya mereka dalam melakukan tugasnya.

5. Komunikasi antar organisasi

Komunikasi antar organisasi yang terjadi disini yaitu antara tim penyeleksi (KPM) keluarga penerima manfaat dengan tim pengvalidasian data, sehingga data yang akan di serahkan ke tahap berikutnya, sehingga diharapkan ketepatan sasaran program.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Dengan banyaknya keluarga berpendapatan rendah yang ada di desa Wonolati ini bantuan pangan seperti BPNT ini sangat dibutuhkan, selain mengurangi beban ekonomi mereka, bantuan pangan melalui e-warong yang bertransaksi secara perbankan ini diharapkan membantu pemerintah dalam meningkatkan keuangan inklusif.

IV. KESIMPULAN

Implementasi program e-warong jika dilihat dari ke enam indikator pengukuran keberhasilan implementasi program bantuan pangan non tunai di Desa Wonolati yang dikatakan efektif adalah indikator sumberdaya dikarenakan sumberdaya dapat berjalan dengan baik karena antara pihak penyedia jasa dapat membantu mempermudah masyarakat memperoleh layanan dengan baik, karakteristik organisasi pelaksana dalam hal ini dapat bekerja dengan kesatuan dan dalam prosedur yang ditetapkan telah sesuai sehingga dapat mencaai satu tujuan yang sama, sikap para pelaksana dalam program e-warong ini sudah baik hal tersebut dapat dilihat dari peran petugas yang sangat selektif dalam menetapkan masyarakat yang memperoleh program BPNT ini, komunikasi antar organisasi berjalan cukup baik sehingga tidak ada perbedaan data penerima BPNT, dan lingkungan sosial ekonomi dan politik dapat dikatakan efektif karena dapat membantu perekonomian masyarakat. Sementara satu indikator dalam implementasi program bantuan pangan non tunai yang belum tercapai yaitu indikator standar dan sasaran kebijakan, karena masih adanya keterlambatan penerimaan bantuan yang menyebabkan kebingungan serta terjadinya antrian dalam pengambilan bantuan di e-warong yang ditentukan.

12

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan artikel ini dapat terselesaikan dengan baik dan tidak terlepas bantuan dari semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terimakasih kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa Wonolati yang telah meluangkan waktunya dan memberikan informasi mengenai program e-warong yang ada di Desa Wonolati.

REFERENSI

- [1] Badan Pusat Statistik Nasional, 2019.
- [2] Dedeh Maryani (2017) *Pemberdayaan Masyarakat*.
- [3] Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1
- [4] Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2018
- [5] Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017
- [6] Anwar Sitepu, *Dari Raskin menjadi Bantuan Pangan Non Tunai*.
- [7] Badan Pusat Statistik, Sidoarjo.
- [8] Hubberman, M. B. (n.d.). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UII Press.

-
- [9] Moleong, L. J. (2008). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
[10] Agustino (2006). *Model- model Kebijakan Publik*.

unplag abd fajar

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|-----|
| 1 | ibimapublishing.com Internet Source | 1% |
| 2 | As'at Rizal, Alshaf Pebrianggara, Achmad Ansori. "Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan PT. Hantar Hamparan Hasil di Pasuruan", JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen dan Perbankan), 2018 Publication | 1% |
| 3 | Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper | 1% |
| 4 | silviqnada.blogspot.com Internet Source | 1% |
| 5 | Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper | 1% |
| 6 | eprints.uniska-bjm.ac.id Internet Source | 1% |
| 7 | Diah Rina Miftakhi, Nurjanah Nurjanah. "Implementasi Manajemen Mutu Terpadu | <1% |

Dalam Memberikan Layanan Untuk Meningkatkan Prestasi Peserta Didik di SLB YPAC Pangkalpinang", SUSTAINABLE: Jurnal Kajian Mutu Pendidikan, 2019

Publication

| | | |
|----|---|------|
| 8 | journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source | <1 % |
| 9 | jurnal.akba.ac.id Internet Source | <1 % |
| 10 | biboxs.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 11 | repository.unair.ac.id Internet Source | <1 % |
| 12 | text-id.123dok.com Internet Source | <1 % |

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On